

JURNAL ARTIKEL

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Oleh :

Dewi Nurul Aisyah, Drs. Herbasuki Nurcahyanto, MT. Drs. R. Slamet Santoso, M. Si

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Beras Miskin (Raskin) Program is a program of food subsidies as a form of government efforts to increase food security and provide protection to poor families through the distribution of rice. Each family will receive a minimum of 10 kg/month with Rp 1,600/kg at the point of distribution. Researchers take focus in Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. In fact, implementation of Raskin policy is not always consider full-on procedure policy as depending on condition and situation in society. The objective of this study is to analyze the implementation of the Beras Miskin (Raskin) program.

This research uses qualitative descriptive method. Data collection was carried out with in-depth interviews from various informants have been determined. In qualitative research, data retrieved from various sources by using a technique of collecting data of which various (triangulation) and continuously until it is saturated.

The result of this research is the determining factors of Beras Miskin (Raskin) program implementation in Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang, Kota Semarang caused by attitude factors (disposition) which is less successful in rice quality, target the household beneficiaries raskin, the number of households that received rice target beneficiaries.

Keywords: Beras Miskin (Raskin) Program, program implementation.

ABSTRAK

Program raskin merupakan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin, masing - masing keluarga akan menerima minimal 10 kg/ KK / bulan dengan harga Rp. 1.600 / kg di titik distribusi. Peneliti mengambil lokus di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi program beras miskin (raskin) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dari berbagai informan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh.

Hasil penelitian ini adalah faktor penentu implementasi program beras miskin (raskin) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat raskin, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat.

Kata Kunci : Program Beras Miskin (Raskin), implementasi program.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Raskin merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program Raskin termasuk bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang terdapat pada Kluster I, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Instruksi presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang kebijakan perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk

melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional.

Program raskin merupakan subsidi pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin, masing- masing keluarga akan menerima minimal 10 kg/ KK / bulan dengan harga Rp. 1.600 / kg di titik distribusi.

Dari hasil penelitian awal, kebijakan raskin belum berjalan sesuai dengan sasaran program. Pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur

kebijakan karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum Raskin. Penyimpangan yang terjadi yaitu tidak tepatnya jumlah beras yang diperoleh para Rumah Tangga Miskin (RTM), yang seharusnya berdasarkan pedoman umum raskin setiap RTM menerima beras sejumlah 15 kg tetapi masyarakat memperoleh kurang dari 5 kg per RTM/RTS per bulannya.

B. TUJUAN

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- b. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Raskin di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

C. TEORI

Implementasi kebijakan terdapat fenomena-fenomena implemementasi kebijakan publik, yaitu : (dalam Nugroho, 2011: 648-652)

1. Ketepatan Kebijakan
Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excelent is the policy*.
2. Ketepatan Pelaksana
Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama

antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*

3. Ketepatan Target
Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
4. Ketepatan Lingkungan
 - a. Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.
 - b. Lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Callista sebagai variabel eksogen.
5. Ketepatan Proses
Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas 3 proses, yaitu :
 - a. *Policy acceptance*. Disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan
 - b. *Policy adoption*. Disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan
 - c. *Strategic readiness*. Disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan.
6. Ketepatan Tujuan

Ketepatan tujuan dinilai dari kesesuaiannya pelaksanaan kebijakan dengan tujuan awal dimana kebijakan tersebut dibuat. Tujuan ini juga dapat dinilai efektif atau efisien sesuai dengan pelaksanaannya dilapangan.

7. **Konsistensi**
Tahapan atau prosedur ini tidak bisa berubah-ubah karena tahapan ini bersifat kaku dan konsisten.

Keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. (dalam Subarsono. 2005: 89-101)

1. **Teori George C. Edwards III (1980)**

Dalam pandangan *Edwards III*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- a. **Komunikasi**
Diperlukan adanya komunikasi yang baik dari setiap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan ini.
- b. **Sumberdaya**
Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur dalam kehidupan. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial
- c. **Disposisi**
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang

dimiliki oleh implementor.

- d. **Struktur Birokrasi**
Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

D. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel, gejala, atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

2. Situs Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan, mengambil pada Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Dengan berbagai pertimbangan bahwa dalam pengelolaan RASKIN di tiap-tiap kelurahan bisa berbeda.

3. Subjek Penelitian

Penentuan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dimana penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti, dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisis dalam penelitian ini.

4. Jenis Data

Karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teks atau tulisan, kata-kata tertulis, tindakan-

tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

5. Sumber Data

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, koran, majalah, internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.

7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain (Sugiyono, 2010 : 256) dilakukan oleh memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti.

8. Kualitas Data

Cara yang dapat dilakukan antara lain : Melakukan wawancara mendalam kepada informan. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Implementasi Kebijakan

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah *how excelent is the policy.*(dalam Nugroho, 2011:650).

1. Intensitas Tujuan

Menurut pedoman umum raskin didalam pelaksanaan program Raskin, Tujuan dari program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok bentuk beras. Selain itu raskin juga bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Hasil interview yang dilakukan oleh Peneliti dapat diketahui bahwa tujuan dari program Raskin dinilai belum tepat. Karena sasaran yang menjadi tujuan tidak sepenuhnya mendapatkan beras dengan jumlah yang ditentukan. Rumah Tangga Sasaran yang seharusnya mendapatkan beras 15kg/KK kenyataannya hanya mendapatkan beras kurang dari 10Kg/KK. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketepatan kebijakan dalam program raskin, belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dari pedoman umum raskin.

2. Ketepatan Pelaksanaan

1. Ketepatan Aktor Pelaksana

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*) (dalam Nugroho, 2011:650). Dalam Pedoman Umum Raskin telah dijelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam melaksanakan program ini. Dalam Pedoman Umum Raskin agar mencapai tujuan yang telah ditentukan dibentuk Tim Koordinasi di setiap Kota, Kecamatan maupun Kelurahan Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa tim pelaksana Program Raskin sudah dibentuk sesuai dengan tingkatannya. Tim Kelurahan juga sudah memilih atau menunjuk masyarakat untuk menjadi koordinator di RW nya masing-masing. Pemilihan koordinator RW berdasarkan hasil kesepakatan dari Kelurahan.

2. Ketepatan Tugas Pelaksana

Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa tim pelaksana Program Raskin sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas-tugas yang ditentukan oleh pedoman umum raskin. Seperti tim kabupaten / kota, tim kecamatan dan tim

kelurahan sudah menjalankan tugasnya dalam pengimplementasian program raskin.

Tim pelaksana raskin di kabupaten / kota, kecamatan dan kelurahan, sudah melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan, melakukan penyaluran hingga titik distribusi dengan baik atau sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Keterlibatan para tim pelaksana raskin kota, kecamatan dan kelurahan memudahkan berjalannya program raskin di Kelurahan Rowosari. Para aktor yang terlibat juga sudah mengetahui dan sudah memahami tugas masing-masing. Sehingga implementasi program raskin yang berjalan di Kelurahan Rowosari bisa dikatakan berhasil.

3. Ketepatan Target

1. Ketepatan Target Penerima

Pada tahun 2013 pemerintah menerapkan kebijakan baru dalam sistem pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program raskin termasuk dalam klaster 1 yaitu yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya untuk melakukan pemenuhan hak dasar,

pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. (dalam <http://tnp2k.go.id/program/klaster-i-2/>)

Dalam ketepatan target peneliti lebih memilih permasalahan pada ketepatan target yang mencakup dalam apakah penerima target ini sudah mengetahui ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan program raskin. Pada kenyataannya ketepatan target yang terjadi di Kelurahan Rowosari belum berjalan sesuai dengan pedoman umum raskin. Sebab masyarakat Kelurahan Rowosari yang tidak termasuk dalam data RTS merasa berhak mendapatkan raskin juga. Sehingga yang menjadi tujuan dari program raskin tidak bisa tercapai sepenuhnya.

4. Ketepatan Proses

1. Kesiapan Pelaksana dalam Menjalankan Kebijakan

Menurut pedoman umum raskin, program raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas strategis dan n program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh

Kementrian/lembaga terkait baik pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawan dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing. Pemerintah pusat berperan dalam pembuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat bergantung kepada pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program raskin, yang diwujudkan dalam 6 (enam) tepat.

Dalam hal ini tim pelaksana program raskin di tingkat Kota, Kecamatan dan kelurahan menyatakan bahwa siap menjalankan program raskin yang diberikan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus melaksanakan program raskin sesuai dengan pedoman umum untuk mencapai tujuan dari program raskin dan memenuhi indikator 6 (enam) tepat yang menjadi tolak ukur keberhasilan program raskin.

2. Kesiapan masyarakat dalam Menjalankan Kebijakan

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat

sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (<http://tnp2k.go.id/program/kl-aster-i-2/>)

Tujuan dan sasaran dari program raskin untuk Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang tidak dipatuhi oleh masyarakat setempat. Maka dari itu terjadi ketidaksiapan masyarakat dalam menjalankan program raskin. Selain itu bisa dilihat dari masyarakat yang bukan RTS tetapi ingin mendapatkan raskin juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa program raskin di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang masyarakatnya belum siap menjalankan program raskin.

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Raskin Kelurahan rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang

1. Komunikasi

Peneliti membahas fenomena komunikasi dengan memperhatikan transmisi, kejelasan dan konsistensi yang disesuaikan dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Transmisi dari aparatur kepada penerima/pelaksana program Raskin

Transmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Langkah awal dalam penyampaian informasi ini merupakan langkah penting agar pelaksana ataupun penerima mengetahui isi dari Program Raskin. Transmisi dalam program raskin disampaikan dengan cara sosialisasi.

Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat kita ketahui bahwa telah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh para tim pelaksana Program Raskin. Sosialisasi dilakukan sampai ke titik distribusi dan rumah tangga sasaran. Sehingga diharapkan sampai ke rumah tangga sasaran memahami isi dari Program raskin yang dijalankan.

2. Kejelasan akan kebijakan / program raskin

George Edwards III (Agustino, 2006 : 150) menyatakan kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana haruslah jelas dan tidak membingungkan masyarakat. Ketidakjelasan program tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan interview yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa kendala dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan rowosari sehingga mengakibatkan pemahaman tentang program raskin sangat kurang. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi program raskin.

3. Konsistensi

Berdasarkan hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat kita ketahui bahwa informasi yang

diberikan oleh atasan sudah konsisten. Jika ada informasi yang baru, langsung disampaikan kepada koordinator yang bersangkutan. Kemudian koordinator menyampaikan lagi hingga informasi tersebut sampai ke rumah tangga sasaran.

2. Sikap (Disposisi)

1. Penerimaan masyarakat terhadap implementasi program Raskin

Masyarakat yang tergolong masyarakat sangat miskin menjadi kelompok sasaran (*target group*) dalam Implementasi Program Raskin.

Berdasarkan hasil interview yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa penerima manfaat raskin di kelurahan Rowosari merasa senang dengan adanya program raskin. Sehingga manfaat dari beras raskin dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Kepuasan terhadap Penggunaan Raskin

Indikator keberhasilan program raskin ada 6 tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas. Hasil interview yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa penerima raskin merasa kurang puas dikarenakan masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program raskin. Program raskin yang berjalan di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang belum tepat kualitas, tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah.

3. Ketersediaan dalam pembayaran raskin

Menurut peraturan didalam Pedoman Umum Raskin pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di Titik Distribusi. Kemudian uang HTR yang diterima pelaksana distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat oleh pelaksana distribusi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan kondisi setempat atau diserahkan kepada Perum BULOG setempat. Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa masyarakat mendukung program raskin dengan kesediaannya membayar beras raskin sesuai dengan kesepakatan RW. Walaupun harga dan jumlah tidak sesuai dengan pedoman umum raskin.

3. Sumber Daya

1. Staf

Staf adalah dalam sebuah era dimana “pemerintah besar” berada dalam serangan dari semua arahan, hal ini mungkin nampak mengejutkan untuk belajar bahwa sebuah sumber pokok kegagalan implementasi adalah staf yang tidak cukup (dalam Tangkilisan, 2003:56). Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki oleh tim pelaksana masing-masing tingkat sudah memadai. Apalagi dengan adanya bantuan dari tim koordinator dari RW setempat.

Hal ini bisa mempermudah pelaksanaan program raskin di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

2. Ketersediaan fasilitas

Seorang implementor mungkin memiliki staf cukup, mungkin memahami apa yang ia duga harus dikerjakan, mungkin memiliki otoritas untuk mengamalkan tugasnya, namun tanpa bangunan perlu, peralatan, persediaan, dan bahkan implementasi ruang hijau tidak akan berhasil (dalam Tangkilisan, 2003:83). Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan program raskin dinilai sudah memadai.

F. PENUTUP

1. Saran

Dalam pelaksanaan implementasi program raskin yang belum optimal, penulis menyumbangkan saran sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan

1. Ketepatan Kebijakan

Dalam ketepatan kebijakan peneliti memberi saran bahwa perlu diadakannya pendataan ulang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil pendataan selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Agar tujuan dan sasaran dari program

berjalan sesuai dengan tujuan.

2. Ketepatan Target

Ketepatan target belum berhasil dilaksanakan di Kelurahan Rowosari. Penulis memberi saran agar pemerintah membuat kartu peserta raskin. Dengan adanya kartu peserta raskin, masyarakat yang tidak memiliki kartu tidak diperbolehkan membeli beras raskin.

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Raskin Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang

1. Komunikasi

Ketidak berhasilan komunikasi di Kelurahan Rowosari dikarenakan masyarakat Rowosari rata-rata berpendidikan rendah. Penulis menyarankan bahwa komunikasi bisa menggunakan bantuan-bantuan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Misalnya seperti membuat brosur semenarik mungkin dan mudah dipahami oleh masyarakat rowosari.

2. Sikap

Saran untuk faktor sikap dalam implementasi program raskin di Kelurahan Rowosari bahwa tim pelaksana raskin kota, kecamatan maupun kelurahan harus lebih tegas dalam menjalankan tugas agar program raskin berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2001. “*Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*”.

Jakarta; Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Badjuri, AbdulKahar dan Teguh Yuwono. 2002. “*Kebijakan Publik (Konsep dan Strategi)*”. Semarang; Jurusan Ilmu

Pemerintahan FISIP UNDIP.

Nugroho D, Riant. 2006. “*Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*”. Jakarta; PT Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Komputindo

Moleong, J Lexy, Prof Dr. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Subarsono, AG. 2005. “*Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*”. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Suwitri, Sri. 2008. “*Konsep Dasar Kebijakan Publik*”. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*.